

EKSISTENSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP RUMAH DENGAN BERMATERIALKAN KONTAINER DI KOTA SURABAYA

Leonardo Natanael Admadja
Jurusan/Program:Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing: Prof. DR. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum

Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S

Abstrak

Dalam mendirikan bangunan diperlukan adanya IMB, namun semenjak adanya Covid 19 pembangunan rumah menggunakan material kontainer meningkat padahal sejatinya pembangunan rumah menggunakan material kontainer belum diatur secara detail berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang eksistensi izin mendirikan bangunan (imb) terhadap rumah dengan bermaterialkan kontainer. Di Kota Surabaya sendiri rumah bermaterialkan kontainer/ atau peti kemas tersebut dibangun untuk menjadi alternatif atas biaya yang dimiliki seseorang terhadap harga dari rumah pada umumnya. Rumah kontainer sendiri dibangun hanya bermaterialkan kontainer yang didesain, dan disusun sehingga menyerupai rumah. Adanya penggunaan rumah bermaterialkan kontainer yang belum diatur mengenai perizinannya tersebut, maka perlu dikaji berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Abstract

In constructing buildings, it is necessary to have an IMB, but since Covid 19 the construction of houses using container materials has increased even though in fact the construction of houses using container materials has not been regulated in detail based on legislation. This study is intended to analyze the existence of a building permit (imb) to a house with container material. In the city of Surabaya itself, the house made of containers/or containers was built to be an alternative to the costs one has to the price of a house in general. The container house itself is built only with containers that are designed and arranged so that they resemble houses. The existence of the use of housing made of containers that have not been regulated regarding the permit, it is necessary to study it based on the Surabaya City Regulation No. 7 of 2009 and the general principles of good governance (AAUPB).